

Relasi Agama, Politik, dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

The Relationship Between Religion, Politics, and Social Change in Sustainable Development

Akdila Bulanov¹, Fanisa Mutiara², Wafiq Azizah³, Siti Aisyah⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 23 April 2026

Revised 25 April 2026

Accepted 30 April 2026

Available online 09 May 2026

Keywords

Agama, Politik Pembangunan, Perubahan Sosial, Pembangunan Berkelanjutan.

Keywords:

Religion, Development Politics, Social Change, Sustainable Development.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sustainable development is a complex process that focuses not only on economic growth but also involves spiritual, political, and social structural dimensions. This article aims to analyze the relationship between religion, politics, and social change in supporting inclusive and human-centered development. Religion acts as social capital and a moral driver that strengthens solidarity and work ethics. On the other hand, development politics functions as an instrument for the allocation of power that ideally transforms towards democratic consolidation ensuring social justice. Social changes triggered by development bring systemic impacts, ranging from economic modernization and urbanization to shifts in cultural values and gender roles. The results of the analysis indicate that the integration of non-doctrinaire religious values, participatory political policies, and the proper management of social change impacts are the key elements in achieving robust and sustainable community welfare.

ABSTRAK

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan proses kompleks yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, politik, dan struktur sosial. Artikel ini

bertujuan untuk menganalisis relasi antara agama, politik, dan perubahan sosial dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berpusat pada manusia. Agama berperan sebagai modal sosial dan motor penggerak moral yang memperkuat solidaritas serta etos kerja. Di sisi lain, politik pembangunan berfungsi sebagai instrumen alokasi kekuasaan yang idealnya bertransformasi menuju konsolidasi demokrasi yang menjamin keadilan sosial. Perubahan sosial yang dipicu oleh pembangunan membawa dampak sistemik, mulai dari modernisasi ekonomi dan urbanisasi hingga pergeseran nilai budaya dan peran gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai agama yang non-indoktrinatif, kebijakan politik yang partisipatif, serta pengelolaan dampak perubahan sosial yang tepat adalah kunci utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan seringkali disalah artikan hanya sebatas kemajuan material dan pertumbuhan ekonomi angka-angka. Namun, hakikat pembangunan yang sesungguhnya adalah peningkatan kesejahteraan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga pilar utama yang saling berinteraksi: agama, politik, dan struktur sosial masyarakat.

Agama memiliki hubungan erat dengan pembangunan karena fungsinya bukan sekadar keyakinan spiritual, melainkan sumber nilai, etika, dan dorongan moral. Sebagai modal sosial, agama mampu menggerakkan perilaku positif dan membangun solidaritas kolektif yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program-program perubahan di masyarakat. (Firmansyah, Anwar Pratiwi, Tiffany Setyo). Namun, faktor agama saja tidak cukup. Dibutuhkan peran politik pembangunan sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya dan kekuasaan secara tepat. Politik harus bertransformasi dari sekadar perebutan kepentingan elit

menjadi sarana pemenuhan hak asasi dan nilai kemanusiaan melalui sistem demokrasi yang sehat. Tanpa pembangunan politik yang kuat, ketimpangan antarwilayah seringkali terjadi akibat keputusan yang lebih didasari oleh dukungan politik dibanding kebutuhan nyata masyarakat.

Seiring berjalannya proses pembangunan dan intervensi politik tersebut, perubahan sosial menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan. Modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan memandang nilai-nilai tradisional. Meskipun perubahan ini menciptakan peluang kemajuan, ia juga membawa tantangan berupa kesenjangan sosial, lunturnya identitas lokal, hingga masalah lingkungan. Oleh karena itu, memahami relasi dinamis antara agama, politik, dan perubahan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berada pada jalur yang memprioritaskan kualitas hidup manusia secara utuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema agama, politik, dan pembangunan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi konsep-konsep hubungan antarvariabel, seperti peran agama sebagai motivator pembangunan, transformasi politik menuju demokrasi substantif, serta dampak perubahan sosial terhadap modernisasi masyarakat. Sintesis dari berbagai literatur ini digunakan untuk membangun kerangka pemikiran mengenai pembangunan yang holistik dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama dan Pembangunan

Agama memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses pembangunan di masyarakat. Agama tidak hanya dipahami sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai sumber dari nilai, etika, dan dorongan moral yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana Pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Agama menjadi landasan kekuatan yang dapat membangun solidaritas sosial, memperkuat rasa kebersamaan, dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perubahan sosial yang positif. Nilai-nilai seperti keadilan, kepedulian, solidaritas, tanggung jawab, dan mengatasi kemiskinan menjadi dasar yang sangat penting dalam pembangunan. Agama juga dianggap mampu memberi arah moral bagi kebijakan publik supaya tidak hanya mengejar kemajuan material, namun juga memperhatikan kesetaraan dan keseimbangan sosial. (Muhyiddin Asep, Rahman, Mohammad Taufiq, 2025)

Hubungan antara agama dan pembangunan masyarakat merupakan interaksi yang kompleks, di mana agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai modal sosial dan penggerak perubahan nyata. Berikut konsep-konsep hubungan antara agama dan pembangunan:

1. Agama sebagai Aset dan Modal Pembangunan Masyarakat

Agama merupakan aset penting dalam pembangunan karena realitas keberagamaan di tengah masyarakat adalah potensi yang bisa dijadikan "kendaraan" atau sarana bagi para pelaku pembangunan dalam menjalankan aktivitasnya. Secara normatif, setiap agama pada dasarnya mengajarkan dan mendorong umatnya untuk terus memperbaiki kualitas hidup, hidup secara normal di dunia, serta berupaya mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ketika pembangunan dilakukan melalui pendekatan keagamaan, masyarakat cenderung lebih mudah

menerima pesan-pesan perubahan karena nilai-nilai pembangunan tersebut sejalan dengan aspirasi spiritual dan kesejahteraan lahir-batin yang mereka yakini.

2. Agama sebagai Motivator dan Penggerak Perilaku

Sebagai sebuah doktrin, agama melahirkan serangkaian perilaku pada diri pemeluknya karena setiap tindakan sehari-hari senantiasa didasarkan pada pemahaman atas ajaran Tuhan yang mereka yakini. Kepercayaan bahwa segala perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat membuat agama menjadi penggerak moral yang sangat kuat dalam membentuk etos kerja dan tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dalam sejarah di mana agama sering menjadi motivator kemajuan melalui pengikutnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memperbaiki kualitas hidup dan mengolah alam semesta sesuai tuntunan agama.

3. Agama dan Pembentukan Identitas Kolektif Masyarakat

Agama memiliki peran sentral dalam membentuk norma dan identitas kolektif yang mengikat anggota masyarakat secara kuat. Dalam masyarakat yang religiusitasnya tinggi, norma sosial seringkali merupakan hasil pemahaman dari ajaran agama, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut tidak hanya didasari oleh sanksi sosial, tetapi juga keyakinan akan konsekuensi setelah mati. Identitas keagamaan yang menyatu dengan nilai-nilai lokal ini menjadi fondasi bagi integrasi kelompok, yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan dukungan kolektif yang solid bagi keberhasilan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

4. Tantangan Konflik dan Pentingnya Pendekatan Non-Indoktrinasi

Meskipun berpotensi besar, keberagaman tafsir agama juga dapat memicu konflik identitas yang mampu menghambat atau bahkan menghentikan proses pembangunan sama sekali. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat melalui bahasa agama harus menghindari cara-cara indoktrinasi paksa dan sebaliknya menggunakan pendekatan yang menghargai kecerdasan serta kesadaran kolektif lokal. Masyarakat sebagai subjek pembangunan harus diajak berpikir mandiri agar ide-ide perbaikan dapat diterima secara sukarela; dengan cara ini, kemajuan yang dicapai akan lebih berkelanjutan dan didukung penuh oleh masyarakat tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan. (Khadiq, 2005)

Politik dan Pembangunan

Politik Pembangunan adalah proses penerapan, penerapan, perbaikan kebijakan Pembangunan yang melibatkan persaingan kepentingan, distribusi kekuasaan, dan partisipasi elit politik dalam masyarakat. Politik Pembangunan mencakup bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan, bagaimana sumber daya dialokasikan, serta peran demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Politik Pembangunan bukan hanya tentang pelaksanaan pembangunan, tetapi, tentang siapa yang berkuasa menentukan arah pembangunan dan untuk kepentingan siapa pembangunan itu dilakukan.

Politik Pembangunan dalam logika demokrasi menunjukkan realitas yang rumit. Studi kasus di kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa ketimpangan Pembangunan terjadi Ketika wilayah Pantura lebih maju dibanding Lamongan Selatan. Dari kasus ini dapat dilihat Pembangunan lebih ditentukan oleh dukungan politik daripada kebutuhan daerah yang sebenarnya. Harapan masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah dan otonomi daerah menciptakan Pembangunan yang adil tidak tercapai secara optimal karena kepentingan elit politik yang mendominasi proses pengambilan keputusan. Demokrasi seharusnya menciptakan pembangunan yang adil melalui otonomi daerah, tetapi dalam praktiknya sering mengabaikan kebutuhan Pembangunan jangka panjang. (Hakim, Ahmad Burhan, Sejati Satryo Pringgo, 2024)

Pembangunan politik pada hakikatnya merupakan sebuah proses transformasi sistematis yang menempatkan manusia sebagai poros utama tujuan kenegaraan. Berakar pada pemahaman politik sebagai instrumen alokasi kekuasaan atau dalam definisi klasik Harold Lasswell mengenai "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana" politik tidak boleh terjebak dalam perebutan pengaruh semata. Sebaliknya, ia harus berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi dan partisipasi aktif rakyat dalam merumuskan kebijakan yang adil. Ketimpangan kekuasaan hanya dapat dikikis apabila politik diarahkan untuk mencapai tujuan substantif berupa pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesejahteraan, kesehatan, keadilan, dan kebebasan.

Transformasi nilai ini mewujudkan dalam konsep pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana keberhasilan tidak lagi diukur secara fisik, melainkan dari sejauh mana masyarakat memiliki kapasitas untuk menentukan masa depan dan mengendalikan lingkungan hidupnya sendiri. Upaya ini ditopang oleh lima pilar kesejahteraan yang saling berkelindan: pengoptimalan kapasitas manusia, pemerataan keadilan (*equity*), pemberdayaan demi kemandirian, keberlanjutan (*sustainability*), serta hubungan saling ketergantungan (*interdependence*) yang harmonis antar berbagai elemen sosial.

Dalam rangka memperkuat pondasi tersebut, diperlukan penguatan struktur melalui pembangunan politik yang mendorong modernisasi sistem dari otoritarianisme menuju demokrasi yang berdaulat. Proses ini menuntut distribusi keadilan yang merata serta terciptanya keteraturan sosial yang stabil. Puncaknya adalah tercapainya konsolidasi demokrasi, sebuah fase di mana nilai-nilai demokratis bukan lagi sekadar prosedur formal, melainkan telah mendarah daging sebagai budaya kolektif. Melalui praktik kekuasaan yang partisipatif dan inklusif, pembangunan politik akhirnya mampu menciptakan kualitas hidup yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. (Aditiyawarman, 2020)

Perubahan Sosial dan Pembangunan

Pembangunan adalah upaya panjang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Dalam sejarahnya, pembangunan bisa terjadi melalui dua cara: secara alami (*imanen*) atau melalui campur tangan (*intervensi*) manusia. Pembangunan alami berlangsung dengan sendirinya seiring perubahan zaman tanpa rencana khusus, sedangkan pembangunan melalui intervensi adalah proses yang disengaja melalui kebijakan atau program tertentu untuk mencapai tujuan yang jelas. Meskipun keduanya ada dalam literatur, konsep pembangunan modern terutama setelah Perang Dunia II lebih menekankan pada aksi yang terencana dan disengaja agar taraf hidup masyarakat bisa meningkat secara lebih cepat dan merata. (Afandi, Muhammad Nur, dkk, 2023)

Perubahan sosial dalam konteks pembangunan merujuk pada transformasi dalam struktur sosial, pola interaksi, norma, dan nilai masyarakat terjadi sebagai hasil dari proses pembangunan. Pembangunan ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi saja melainkan juga melibatkan aspek-aspek lain seperti perubahan budaya, politik, teknologi, dan lingkungan. Beberapa aspeknya diantara lain:

Pertama, modernisasi ekonomi menjadi motor penggerak utama yang mengubah wajah masyarakat secara mendasar. Pembangunan ekonomi menggeser corak kehidupan dari masyarakat agraris di pedesaan menjadi pekerja kantoran atau buruh pabrik di perkotaan, yang secara otomatis mengubah cara mereka menjalani aktivitas hidup sehari-hari.

Kedua, urbanisasi muncul sebagai salah satu dampak besar dari proses pembangunan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mengejar peluang ekonomi yang lebih baik ini memengaruhi pola interaksi sosial serta melahirkan tantangan baru, seperti kemiskinan perkotaan dan kesenjangan sosial yang memerlukan penanganan serius.

Ketiga, aspek pendidikan dan pengetahuan menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang siap menghadapi perubahan. Melalui akses pendidikan yang lebih luas, pembangunan membentuk individu yang cerdas dan modern, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika pergeseran sosial di era global.

Keempat, terjadi perubahan nilai dan norma sosial yang signifikan seiring masuknya arus modernisasi. Pandangan tradisional mengenai peran gender, struktur keluarga, dan etika kerja mulai bergeser; contoh nyatanya adalah peran perempuan yang kini semakin luas dan diakui di sektor profesional, tidak lagi terbatas hanya pada ranah domestik.

Kelima, kesenjangan sosial sering kali menjadi efek samping dari pembangunan yang tidak merata. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan semakin lebar, yang jika dibiarkan dapat menjadi sumbu pemicu ketidakpuasan serta konflik di tengah masyarakat.

Keenam, perkembangan teknologi mendorong kemajuan pembangunan sekaligus mengubah total cara manusia menjalani hidup. Meski inovasi teknologi mempermudah akses informasi dan komunikasi, ia juga mengubah dinamika interaksi sosial dan memaksa struktur sosial untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di kancah global.

Ketujuh, perubahan dalam struktur keluarga terlihat jelas akibat pengaruh industrialisasi dan urbanisasi. Pola keluarga besar yang tinggal bersama dalam satu atap kini mulai berkurang dan bergeser menjadi unit keluarga inti, yang mencerminkan gaya hidup masyarakat modern yang lebih mandiri dan fleksibel.

Kedelapan, pembangunan berdampak langsung pada aspek politik dan keterlibatan sosial. Seiring dengan kemajuan pendidikan, kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka semakin meningkat, yang kemudian mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, demokratis, serta partisipasi publik yang lebih kuat dalam setiap pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, pembangunan dapat menciptakan peluang bagi kemajuan sosial, namun juga dapat menimbulkan tantangan seperti ketimpangan, dislokasi budaya, dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Perubahan sosial memiliki dampak besar terhadap proses modernisasi yang mencakup transformasi dalam struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi.

Berikut adalah beberapa dampak perubahan sosial terhadap modernisasi:

1. Perubahan Struktur Ekonomi

Merupakan salah satu tanda utama modernisasi, di mana masyarakat yang dulunya bergantung pada pertanian beralih ke sektor industri dan jasa. Urbanisasi besar-besaran terjadi karena banyak orang pindah ke kota demi mencari peluang kerja baru. Meskipun meningkatkan produktivitas nasional, perubahan ini bisa meninggalkan kelompok masyarakat tradisional yang sulit beradaptasi.

2. Perubahan Struktur Sosial dan Kelas

Modernisasi mengubah struktur sosial dan kelas, yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial yang lebih tinggi. Pendidikan kini menjadi kunci utama bagi seseorang untuk meningkatkan taraf hidup dan masuk ke jajaran kelas menengah. Namun, di balik itu, globalisasi berisiko menciptakan kelompok elit baru yang menguasai ekonomi, sehingga kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan besar.

3. Urbanisasi dan Perubahan Gaya Hidup

Fenomena urbanisasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga mengubah gaya hidup secara drastis. Kota-kota besar kini menjadi pusat inovasi dan budaya yang menawarkan akses fasilitas yang lebih baik. Namun, pertumbuhan kota yang terlalu cepat

tanpa dukungan infrastruktur yang memadai sering kali memicu masalah baru, seperti kemiskinan perkotaan dan munculnya permukiman kumuh.

4. Perubahan Nilai dan Budaya

Dalam aspek nilai dan budaya, modernisasi mendorong masyarakat untuk berpikir lebih rasional dan toleran terhadap perbedaan. Nilai-nilai lama yang bersifat kaku mulai digantikan oleh prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Tantangannya adalah terjadinya benturan budaya atau hilangnya identitas lokal akibat kuatnya pengaruh budaya global yang masuk lewat berbagai media.

5. Pengaruh Teknologi terhadap Kehidupan Sosial

Pengaruh teknologi bertindak sebagai motor penggerak yang meningkatkan efisiensi di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Kita kini terhubung secara global, namun ketergantungan ini bisa menciptakan ketimpangan digital bagi mereka yang tidak memiliki akses. Selain itu, interaksi tatap muka yang berkurang sering kali membuat masyarakat menjadi lebih individualis.

6. Perubahan dalam Sistem Politik

Modernisasi sering kali berjalan beriringan dengan perubahan sistem politik ke arah yang lebih inklusif. Masyarakat yang lebih terpelajar menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam pemerintahan. Namun, jika perubahan politik terjadi terlalu mendadak sementara sistem lama belum siap, hal ini justru bisa memicu ketidakstabilan atau konflik internal dalam negara.

7. Meningkatkan Peran Pendidikan

Peran pendidikan menjadi semakin sentral sebagai mesin penggerak modernisasi. Akses pendidikan yang luas melahirkan tenaga kerja terampil yang inovatif, namun tantangannya adalah memastikan kurikulum sekolah tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Jika sistem pendidikan tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi, maka angka pengangguran lulusan muda akan tetap tinggi.

8. Perubahan dalam Peran Gender

Dalam peran gender, di mana batasan tradisional bagi perempuan mulai memudar. Saat ini, perempuan memiliki akses yang sama untuk mengejar karier dan terlibat dalam dunia politik. Meski begitu, perubahan ini terkadang masih menghadapi hambatan dari kelompok masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai konservatif.

9. Perubahan dalam Keluarga dan Komunitas

Modernisasi secara perlahan mengubah keluarga dan komunitas menjadi lebih kecil dan mandiri. Meskipun hal ini memberikan kebebasan individu, sisi negatifnya adalah melemahnya ikatan kekeluargaan dan gotong royong yang dulu sangat erat. Masyarakat modern cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kolektif atau komunitasnya.

10. Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Modernisasi membawa peningkatan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Kita semakin sadar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak alam, sehingga muncul berbagai solusi ramah lingkungan. Namun, tantangan terbesarnya tetaplah polusi dan perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas industri yang terus meningkat demi mengejar kemajuan materi. (Kusumastuti,dkk, 2025)

SIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang kompleks karena tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bergantung pada relasi harmonis antara

agama, politik, dan perubahan sosial. Agama berperan sebagai aset dan modal sosial yang memberikan landasan moral, etika, serta solidaritas sosial yang diperlukan untuk mendorong masyarakat terlibat dalam perubahan positif. Melalui pendekatan keagamaan, pesan-pesan pembangunan lebih mudah diterima karena selaras dengan aspirasi spiritual dan kesejahteraan lahir-batin masyarakat. Namun, potensi ini harus dibarengi dengan praktik politik pembangunan yang tidak hanya berfokus pada alokasi kekuasaan elit, melainkan bertransformasi menjadi instrumen yang berpusat pada manusia untuk menjamin keadilan, pemerataan, dan penguatan kualitas demokrasi.

Di sisi lain, proses pembangunan secara terencana maupun alami senantiasa memicu perubahan sosial yang signifikan, seperti modernisasi ekonomi, urbanisasi, serta pergeseran nilai dan norma di masyarakat. Meskipun perubahan ini membawa kemajuan melalui akses pendidikan dan teknologi, tantangan berupa kesenjangan sosial, dislokasi budaya, dan melemahnya ikatan kekeluargaan tetap menjadi risiko yang nyata. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi yang partisipatif dan pendekatan pembangunan yang menghargai kesadaran kolektif lokal menjadi kunci agar kemajuan yang dicapai bersifat kokoh, manusiawi, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Aditiyawardman. (2020). *Pembangunan politik dan kualitas demokratis*. Jurnal Moderat, 6.
- Afandi, M. N., et al. (2023). *Collaborative governance: Suatu tinjauan konseptual model collaborative governance dan implementasi pencapaian SDGS pada studi intervensi stunting di pemerintah daerah*. Deepublish Digital.
- Firmansyah, A. P., & Setyo, T. (n.d.). *Agama dan pembangunan: Beragam pandangan dalam melihat keberkaitan agama terhadap proses pembangunan dan modernisasi*. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2963.149-162>
- Hakim, A. B., & Pringgo, S. S. (2024). *Politik pembangunan dalam logika demokrasi representatif*. *Journal of Constitutional Law*, 1.
- Khadiq. (2005). Agama sebagai “modal” pembangunan masyarakat. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 6, 122–141.
- Kusumastuti, et al. (2025). *Ilmu sosial dan budaya dasar*. Mega Press Nusantara.
- Muhyiddin, A., & Rahman, M. T. (2025). *Agama dan pembangunan*.